

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA BUMDES MAJU BERSAMA**

(Laporan Akhir)

Oleh:

MUHAMMAD NAJIEB RIDHO

NPM 19010810026s



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN
PERBANKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BUMDES MAJU BERSAMA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Adalah Usaha yang didirikan Desa Untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Akuntabilitas itu adalah tanggung jawab dan kewajiban yang diatur melalui UU/Hukum untuk memberikan layanan atau bantuan kepada pihak independen. Dengan kata lain dalam konteks birokrasi, akuntabilitas mengharuskan penyajian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas semua kegiatan terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Kaitannya dengan Bumdes maju bersama mereka sudah melakukan akuntabilitas secara lengkap namun untuk segi transparansi Bumdes tergolong kurang transparan dimana dapat dilihat dari temuan peneliti pada Bumdes Maju Bersama pihak pengelola hanya menyampaikan informasi keuangan kepada perwakilan saja seperti Perangkat Desa.

Oleh
MUHAMMAD NAJIEB RIDHO

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Badan Usaha Milik Desa

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA BUMDES MAJU BERSAMA**

Oleh

Muhmammad Najieb Ridho

NPM 1901081026

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Ahli Madya (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan

Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BUMDES MAJU BERSAMA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Adalah Usaha yang didirikan Desa Untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Akuntabilitas itu adalah tanggung jawab dan kewajiban yang diatur melalui UU/Hukum untuk memberikan layanan atau bantuan kepada pihak independen. Dengan kata lain dalam konteks birokrasi, akuntabilitas mengharuskan penyajian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas semua kegiatan terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Kaitannya dengan Bumdes maju bersama mereka sudah melakukan akuntabilitas secara lengkap namun untuk segi transparansi Bumdes tergolong kurang transparan dimana dapat dilihat dari temuan peneliti pada Bumdes Maju Bersama pihak pengelola hanya menyampaikan informasi keuangan kepada perwakilan saja seperti Perangkat Desa.

Oleh
MUHAMMAD NAJIEB RIDHO

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Badan Usaha Milik Desa

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
BUMDES MAJU BERSAMA**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Najieb ridho**

No. Pokok Mahasiswa : 19010810026

Program Studi : Diploma III Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui
Pembimbing

Dr. Keumala Hayati, S.E., M.Si.
NIP. 197611102000122001

Mengetahui
Ketua Program Studi
DIII Keuangan dan Perbankan

Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc
NIP. 19770324 200812 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Keumala Hayati, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.



Sekretaris Penguji : Dr. Edwin Russel, S.E., M.Sc.



Tanggal Lulus Ujian : 19 Juni 2024



**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Najieb Ridho
NPM : 1901081026
Prodi : DIII Keuangan dan Perbankan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa Tugas akhir yang berjudul “ **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOAAN KEUANGAN PADA BUMDES MAJU BERSAMA**”. Adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Juni 2024
Yang memberi pernyataan



Muhammad Najieb Ridho

NPM 1901081026

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Najieb Ridho dilahirkan dan dibesarkan di Bandar Lampung, pada tanggal 11 oktober 2000 dari pasangan Bapak Erwin Surya Darma dan Ibu Asmara Dewi. Penulis merupakan anak ke pertama dari empat bersaudara. Adik penulis bernama M Qemal Hasan, Chiara Qwiney Edisha, M Al Gyfari, Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu :

Pada tahun 2006 penulis masuk SDN 2 Perumnas Way Kandis lulus pada tahun 2012. Selanjutnya menempuh pendidikan di MTsN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Kemudian masuk ke SMA YP Unila lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Lampung dengan mengambil program studi D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Usaha Milik Desa di Desa Relung Helok. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi yaitu pada tahun 2021 menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas izin dan ridho-Nya yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada saya dalam menyelesaikan laporan akhir ini. Saya persembahkan ini kepada kedua orang tua Erwin Surya Darma dan Asmara Dewi yang tercinta atas segala pengorbanan, memberikan semangat, berjuang untuk keberhasilan-ku, memberikan cinta dan kasih sayang serta mendidikku dansenantiasa berdoa untuk keberhasilan anak-anaknya. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikannya laporan akhirini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-nya, kesehatan, kemurahan rezeki, keberkahan umur kepada Ayahanda dan Ibunda serta berada dalam lindungan Allah SWT. Amiin.

MOTTO

“Tak ada yang tidak bisa bagi jiwa jiwa yang terus berusaha, karena ide ide besar lahir dari manusia yang pantang menyerah jadilah pelukis sejati bagi hidupmu sendiri”. – Qomiqin

SANWACANA

AssalamualaikumWr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bumdes Maju Bersama dengan judul :

**“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA BUMDES MAJU BERSAMA”.**

Penulisan laporan akhir ini merupakan salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Jurusan Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, doa, dan semangat yang diberikan, kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M. Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Zainnur M. Rusidi, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M, Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini yang telah memberikan perhatian, arahan serta ilmunya.
5. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M, Sc. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas semua perhatian, bantuan, bimbingan dan dukungan ibu selama ini dari awal saya menginjakkan kaki hingga saya keluar menjadi alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Dr. Keumala Hayati, S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Laporan akhir. Terimakasih atas Bantuan dan dukungannya selama ini yang telah memberikan perhatian, arahan serta ilmunya.
7. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya.

8. Pak Parman selaku kepala bumdes Terimakasih atas bimbingannya selama PKL.
9. Kepada Keluarga, saudara dan sahabat penulis yang telah memberikan dorongan, doa dan semangat yang luar biasa sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir.
10. Untuk perempuan istimewa inisial A. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan semangat. Terima kasih karena sudah membantu dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
11. Seluruh teman-teman Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung angkatan 2019. Terimakasih untuk semua arahan, perhatian dan dukungannya.
12. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, semangat dan dukungannya selama pengerjaan laporan akhir.
13. Almamater tercinta yang menjadi identitas selama masa studi.
14. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan.

Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca Laporan Akhir ini menjadi lebih baik dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, Penulis

Muhammad Najieb Ridho

NPM 1901081026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Pengertian Bumdes	4
2.1.1 Fungsi dan Tujuan.....	5
2.2 Akuntabilitas	5
2.2.1 Pengertian Akuntabilitas	5
2.2.2 Jenis-jenis Akuntabilitas	5
2.2.3 Pentingnya Akuntabilitas	6
2.2.4 Indikator Tercapainya Akuntabilitas	6
2.3 Transparansi.....	7
2.3.1 Pengertian Transparansi.....	7
2.3.2 Tujuan Transparansi	8
2.3.3 Indikator Tercapainya Transparansi	8
BAB III METODE PENELITIAN.....	10

3.1 Lokasi Penelitian.....	10
3.2 Waktu Penelitian	10
3.3 Jenis Data	10
3.4 Sumber Data.....	10
3.5 Teknik Pengumpulan Data	12
3.6 Metode Analisis Data	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1 Gambaran Umum BUMDes : Inovasi dalam Pengelolaan UsahaDesa	16
4.1.1 Peran BUMDes dalam Merangsang Pertumbuhan Ekonomi	16
4.1.2 Aspek Ruang Lingkup BUMDes Maju : Profil, Visi, Misi, Dan `Kerangka Hukum.....	17
4.2 Pembangunan Desa melalui Program BUMDes.....	21
4.3 Implementasi Pelaksanaan dalam hal Pengelolaan, Permasalahan, Program kerja Dan keuangan.....	21
4.4 Tinjauan Hasil Wawancara: Evaluasi Kondisi BUMDes Saat Ini.....	23
4.5 Analisis Dalam Penilaian Keuangan Awal BUMDES Maju Bersama. 24	24
4.6 Hasil Penelitian	26
4.6.1 Interpretasi Data Keuangan sebagai Indikator Kinerja BUMDES Maju Bersama	27
4.6.2 Analisis Rasio Kesehatan Keuangan RKAP Tahun 2021 dan 2022	28
4.6.3 Analisis Matrik Rencana Kerja Dalam Hitungan Estimasi Pendapatan Dalam Hal Menaikan Jumlah Modal Simpan Pinjam	30
4.6.4 Analisis Rencana Neraca BUMDes untuk Perkiraan Tahun Mendatang	32
4.7 Hasil Rekomendasi Berdasarkan Penelitian	35
4.7.1 Tahapan Evaluasi BUMDes Dalam Langkah-LangkahStrategis Untuk Meningkatkan Kesejahteraan.....	35
4.7.2 Identifikasi Resiko	38
4.7.3 Implikasi Dan Saran Untuk Penelitian Selanjutnya.....	43

BAB V PENUTUP.....	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Anggota Pengurus BUMDes Maju19
Gambar 4.2 Dokumentasi : Foto Berupa Wawancara Terhadap Narasumber23

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tingkat Kesehatan Keuangan BUMDESMAJU BERSAMATahun 2022 dan 2021	28
Tabel 4.2 Indikator pengukur Keberhasilan Suatu Program Dan Kegiatan Dalam Menaikan Jumlah Modal Simpan Pinjam.....	31
Tabel 4.3 Proyeksi Neraca Tahun Mendatang	32
Tabel 4.4 Identifiikasi Penurunan Produktivas	38
Tabel 4.5 Indikator Perubahan Produktivitas	38
Tabel 4.6 Indikator Peningkatan Dalam Hal Peningkatan Ekuitas	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

BUMDes merupakan sebuah entitas ekonomi desa yang sah, didirikan dan dimiliki oleh pemerintah desa, yang dikelola secara mandiri dan profesional dalam aspek ekonomi, dengan sebagian atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa. Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Dari sudut pandang sosial, keberadaan lembaga ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa dengan swadaya sesuai dengan kepentingan bersama masyarakat, dan membantu dalam upaya peningkatan kemandirian serta kreativitas masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Secara hukum, peraturan mengenai BUMDes didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 ayat (1), yang menyatakan bahwa desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Suatu organisasi dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan cara memberikan laporan secara berkala.

Di tingkat pemerintahan desa, akuntabilitas keuangan melibatkan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa baik kepada pemerintah kabupaten/kota secara vertikal, maupun kepada masyarakat secara horizontal, mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan secara periodik. Tingkat keberhasilan atau kegagalan akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa diukur dari sejauh mana pemerintah desa mematuhi prinsip-prinsip partisipatif, akuntabel, transparan, tertib, dan disiplin. Penerapan akuntabilitas keuangan secara vertikal dan horizontal yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut bukan hanya mencerminkan kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga memfasilitasi penyaluran

dana dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi kepada masyarakat umum serta kejelasan mengenai peraturan perundang-undangan, dan kepuasan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut: Akses terhadap informasi yang tepat dan akurat, penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur dan biaya, kemudahan akses, serta penyusunan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat mencerminkan terwujudnya tata kelola yang baik, di mana terdapat hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong akuntabilitas, transparansi, serta responsivitas pemerintah lokal. Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa harus dikelola dengan prinsip transparansi, karena hal ini akan memastikan akses atau kebebasan setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa.

Transparansi menjadi hal penting terkait keputusan penting yang diambil oleh pemerintah yang berdampak pada banyak pihak, sehingga pemerintah harus memberikan informasi yang komprehensif mengenai tindakan yang telah diambilnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BUMDES MAJU BERSAMA”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penulisan laporan akhir ini adalah “Apakah pengelolaan keuangan pada BUMDES Maju Bersama sudah Transparan dan Akuntabel?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan tujuan penulisan ini untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada di BUMDES Maju Bersama kecamatanNegri Katon kabupaten Pesawaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian memberikan data sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu akuntansi khususnya dalam hal menganalisis kinerja keuangan.

2. Praktis

Penelitian ini menggambarkan keadaan realita tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDES) yang ada di Desa Relung Helok Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran dan dapat menjadi penilaian terhadap transparansi dana akuntabilitas pengelolaan keuangan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bumdes

Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Desa (selanjutnya disebut BUMDES) adalah sebuah entitas usaha yang dimiliki sebagian besar atau sepenuhnya oleh Desa, dan kegiatan usahanya dilakukan menggunakan aset Desa. BUMDES memiliki peran ganda sebagai penyokong aktivitas ekonomi di desa serta sebagai lembaga yang menyediakan layanan sosial dan komersial. Secara sosial, BUMDES bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam penyediaan layanan sosial untuk masyarakat, sementara secara komersial, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa lokal ke pasar.

Pendirian BUMDES merupakan inisiatif ekonomi bermodal usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan prinsip kemandirian. Meskipun modal awalnya harus bersumber dari masyarakat, namun BUMDES juga berpotensi untuk mendapatkan pendanaan tambahan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah desa atau pihak ketiga. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam persiapan pendirian BUMDES, mengingat keterkaitannya dengan regulasi setempat seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes).

Dari uraian di atas, BUMDES bisa dipahami sebagai entitas ekonomi desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa secara independen, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta mendidik mereka untuk hidup mandiri, sehingga dapat memperkuat perekonomian desa secara keseluruhan.

2.1.1 Fungsi dan Tujuan

BUMDES, singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, adalah sebuah entitas usaha dimana mayoritas atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa dengan menyediakan dana langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengurus aset, layanan, dan usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan sebanyak mungkin.

2.2 Akuntabilitas

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2006), Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala.

Menurut (Halim, 2012), Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab yang ditanggung oleh individu atau entitas atas setiap tindakannya kepada pihak yang memberikan otoritas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab itu sendiri mencakup kewajiban yang diatur oleh hukum untuk memberikan layanan atau bantuan kepada pihak independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi terkait dengan pengelolaan keuangan kegiatan. Dengan kata lain, dalam konteks birokrasi sebuah instansi pemerintah, akuntabilitas mengharuskan penyajian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang pertanggung jawabannya

2.2.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2013), akuntabilitas terbagi menjadi dua jenis, yakni: Akuntabilitas Vertikal:

Akuntabilitas vertikal merujuk pada tanggung jawab yang diberikan kepada pihak otoritas yang memiliki posisi lebih tinggi, seperti tanggung jawab kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sejenisnya.

Akuntabilitas Horisontal: adalah bentuk tanggung jawab yang ditujukan kepada masyarakat secara luas atau kepada lembaga lain yang sejajar dan tidak memiliki hubungan hierarki atasan-bawahan.

2.2.3 Pentingnya Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh setiap organisasi pada berbagai tingkat atau unit sebagai tanggung jawab pekerjaan untuk memberikan laporan kegiatan kepada pihak yang berada di atasnya. Akuntabilitas publik memiliki tiga peran utama, yaitu:

1. Menyediakan kontrol publik yang demokratis.
2. Mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi melalui proses pembelajaran.

2.2.4 Indikator Tercapainya Akuntabilitas

Terdapat beberapa tahapan untuk menjaminnya akuntabilitas terlaksana, yaitu:

1. Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*.
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku.

- d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - c. Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

2.3 Transparansi

2.3.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari Good Corporate Governance. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip

check and balance (antar lembaga eksekutif dan legislatif). Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.

Menurut penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya, transparansi merupakan keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi kepada masyarakat. Dan tujuannya transparansi adalah sebagai bukti kejujuran untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengelolanya.

2.3.2 Tujuan Transparansi

Tujuan dari menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan sejak dini melalui kesadaran masyarakat dengan adanya pengawasan sosial. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap suatu organisasi (Novie: 2017) [11]. Shafratunnisa (2015) [12] menyebutkan bahwa tujuan transparansi dalam penyusunan anggaran dapat diuraikan menjadi lima kriteria, yakni:

1. Pengumuman kebijakan anggaran yang tersedia.
2. Dokumen anggaran yang tersedia dan mudah diakses.
3. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tepat waktu.
4. Terakomodasinya usulan atau suara masyarakat.
5. Sistem pemberian informasi kepada publik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi adalah untuk mengurangi potensi penyimpangan dalam penggunaan dana, mencegah keraguan publik, dan mencapai tujuan yang diinginkan.

2.3.3 Indikator Tercapainya Transparansi

Menurut Nico (2007:21-22)[10] bahwa keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
2. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang

peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.

3. Adanya basis legal untuk pajak
4. Adanya basis legal untuk pertanggung jawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
5. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
6. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
7. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran).
8. Diumulkannya setiap kebijakan anggaran.
9. Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
10. Adanya dokumentasi anggaran yang baik mengandung beberapa indikasi fiskal.
11. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual
12. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci manajemen fiskal.
13. Adanya lembaga audit yang independen.
14. Adanya indikator statistik yang akurasi datanya berkualitas.
15. Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran
16. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
17. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
18. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada BUMDES Maju Bersama yang beralamat di Desa Relung Helok Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 40 Hari, terhitung daritanggal 24 Januari sampai dengan 4 Maret 2022.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut (Sugiyono, 2013) yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Sugiyono, (2013) yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti data laporan keuangan periode tahun 2021 dan 2023 di BUMDES Maju Bersama, Desa Relung Helok.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Pengertian Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti wawancara, jajak pendapat, atau observasi langsung terhadap individu, kelompok, kejadian, atau objek.

Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data dengan menjawab pertanyaan riset melalui metode survei atau melakukan observasi terhadap objek penelitian. Data primer memiliki keunggulan karena lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti, sehingga risiko kesalahan atau kebohongan dari sumber data dapat diminimalkan. Namun, kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang cukup besar untuk pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2013), Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, tanpa melalui perantara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, di mana peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian, seperti yang dilakukan dalam studi terhadap BUMDES Maju Bersama, Desa Relung Helok.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber yang bukan asli, seperti buku, catatan, bukti, atau arsip yang sudah ada, baik itu dipublikasikan secara luas maupun tidak. Dengan kata lain, untuk mengumpulkan data sekunder, peneliti perlu melakukan kunjungan ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang relevan dengan penelitiannya. Keuntungan menggunakan data sekunder adalah waktu dan biaya yang lebih sedikit dibutuhkan untuk mengklasifikasi masalah dan mengevaluasi data, dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Namun, kelemahan dari penggunaan data sekunder adalah jika terjadi kesalahan, kedaluwarsa, atau ketidakrelevanan sumber data tersebut, hal tersebut dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Menurut Sugiyono (2013), data sekunder adalah informasi yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh organisasi selain dari yang mengolahnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data sekunder

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara, yaitu data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Contoh data sekunder mencakup gambaran umum dan laporan keuangan BUMDES Maju Bersama untuk tahun 2021 dan 2022.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagaiberikut :

1. Observasi

Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, observasi erat kaitannya dengan pengamatan terhadap objek dan fenomena, termasuk faktor penyebab dan dampaknya secara menyeluruh. Mereka yang melakukan observasi biasanya disebut sebagai pengamat. Secara umum, observasi adalah proses mengamati objek secara langsung dan rinci untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek tersebut. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan.

Metode pengamatan harus dilakukan secara sistematis agar mendapatkan informasi yang akurat. Kegiatan pengamatan memiliki ciri-ciri tertentu, seperti objektif, faktual, dan sistematis. Observasi juga dapat melibatkan lebih dari satu orang. Observasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti observasi partisipasi, observasi sistematis, dan observasi eksperimental. Pada observasi eksperimental, pengamat sudah merencanakan secara matang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Sugiyono (2013) mendefinisikan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang terkait dengan perilaku manusia, proses kerja, atau gejala alam, terutama jika responden yang diamati tidak terlalu banyak. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung pada instansi yang relevan untuk mengumpulkan data yang

diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan dialog antara dua orang atau lebih, yakni narasumber dan pewawancara, dengan maksud untuk mengumpulkan informasi. Dengan demikian, teknik wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data yang digunakan, terutama dalam konteks penelitian tertentu. Menurut definisi dari KBBI, wawancara adalah proses tanya jawab antara seseorang (baik pejabat maupun individu lainnya) untuk mendapatkan pendapat atau informasi tentang suatu hal, yang kemudian dapat dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan di televisi. Wawancara dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk berbagai tujuan, seperti jurnalis, pencari kerja, peneliti, dan lain sebagainya.

Suliyanto (2004:137) menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung berdialog dengan responden untuk memperoleh informasi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait dalam penyusunan tugas akhir ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka atau studi kepustakaan adalah proses mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi fokus penelitian atau topik yang disajikan dalam karya tulis non-ilmiah seperti novel. Biasanya, studi kepustakaan lebih umum dilakukan dalam penulisan karya ilmiah karena memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan karya tulis non-ilmiah. Penggunaan istilah ini menjadi lazim dalam konteks penelitian karena proposal penelitian perlu disusun di awal.

Menurut Nazir (sebagaimana dikutip dalam Raharja 1998: 111), Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelitian mendalam terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Studi kepustakaan

memiliki peran penting dalam penelitian karena dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam penyusunan Tugas Akhir.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan, mencari, menyelidiki, menggunakan, dan menyediakan dokumen untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan bukti serta menyampaikannya kepada pengguna. Dokumentasi juga merupakan kegiatan penyediaan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan catatan dari berbagai sumber informasi. Terdapat pandangan yang menyamakan dokumentasi dengan kearsipan di perpustakaan, meskipun tidak selalu demikian. Beberapa ahli menggambarkan dokumentasi sebagai kumpulan dokumen tentang subjek tertentu. Contohnya, data yang dikumpulkan melalui proses dokumentasi dapat digunakan untuk mengenalkan perusahaan kepada karyawan baru atau mengevaluasi kinerja karyawan yang telah pensiun. Dalam konteks bisnis, dokumentasi sering dikaitkan dengan proses administrasi.

Menurut Haris (2010:143), dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan pengamatan atau analisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain yang terkait dengan subjek. Dokumentasi menjadi salah satu cara bagi peneliti kualitatif untuk memahami perspektif subjek melalui dokumen tertulis atau media lain yang dibuat atau disusun oleh subjek itu sendiri. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup laporan mengenai data keuangan pada periode 2021 dan 2022, serta dokumentasi visual mengenai kegiatan bagian keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Relung Helok.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis ini menggambarkan data dalam bentuk kalimat, kata, atau gambar. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan

teknik pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2014), langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data: Peneliti mencatat data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Catatan lapangan ini terkait dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.
2. Reduksi Data: Data dikelompokkan berdasarkan jenis yang sama, dan data yang tidak relevan dibuang. Proses ini membantu peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan informasi terkait data keuangan di Desa Relung Helok.
3. Penarikan Kesimpulan: Peneliti menyimpulkan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mengidentifikasi hubungan, persamaan, atau perbedaan, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Akuntabilitas dan Transparansi BUMDes di Desa Relung Helok, Kecamatan Negri Katon, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Maju Bersama Desa Relung Helok Masih kurang dalam hal transparansi, terlihat dari beberapa indikator. Pertama, keterbatasan informasi keuangan terlihat dari hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes Desa Relung Helok hanya diketahui oleh sejumlah kriteria tertentu, seperti pengelola dan perangkat desa. Kedua, ketersediaan informasi masih terbatas, karena laporan keuangan BUMDes Desa Relung Helok sulit diakses oleh masyarakat. Ketiga, kelengkapan informasi dari pengelola dan pemerintah desa masih belum memadai dan tidak jelas dalam penyampaian kepada masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka ada beberapa hal yang peneliti berikan sebagai saran yaitu sebagai berikut:

1. Agar pengelola BUMDes Maju Bersama Desa Relung Helok membuat sarana komunikasi dan mengundang seluruh warga untuk menghadiri musyawarah tahunan, bukan hanya perwakilan, sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes.
2. Harapannya, pelaporan keuangan akan terus meningkat ke depannya, sehingga pengelola BUMDes perlu meningkatkan sumber daya manusia agar proses pelaporan tidak tergantung pada beberapa elemen saja. Di masa mendatang, pelaporan dapat dilakukan oleh individu yang memiliki pemahaman tentang keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Sri Kusuma. (2014). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, "Journal Of Rural And Development", vol,5,no.1.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=qyaPh8oAAAAJ&citation_for_view=qyaPh8oAAAAJ:u-x6o8ySG0Sc
- Zulkarnain Ridlwan. (2013). "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No, 3, 2013. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>
- Amrizal Imawan Et Al, *Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik*, "Jurnal Akuntansi Multiparadigma", Vol 10, No 1, 2019. H 156.
- Azza Nur Zubaidah, & Nugraeni, N. (2023). *PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMEN*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 978-988. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475>
- Artha Satya Dharma. (2021). *Kinerja Keuangan dan Risiko BUMDes (Studi Kasus pada BUMDes Suka Pura)*. Artha Satya Dharma, 14(1), .
<https://doi.org/10.55822/asd.v14i1.68>
- Andrianto, N. 2007. *Good Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-government*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Adrianto, Nico (2007) *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Halim. (2021). *Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas SMK*. Semarang.
- Mardiasmo. (2006). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Pascasarjana Universitas Cendrawasih*. Papua.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
- Novie (2017) *Tujuan penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan*.
- Shafratunnisa, Fierda (2015) *Persepsi Stakholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kepada Stakholders di SD Islam Binakheir*.